

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak peristiwa reformasi demokrasi di Indonesia, pembicaraan mengenai hidup bersama tidak lagi didominasi oleh wacana propaganda negara, demokrasi kembali lagi ke marwah sebenarnya. Setiap orang berhak untuk berbicara dan mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama harus diatur. Mengingat yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, maka tentu subjektivitas relatif terbuka. Runtuhnya Orde Baru pada 1998 yang dikenal dengan reformasi, memberikan angin segar bagi munculnya ruang partisipasi masyarakat. Tapi, harapan itu sepertinya akan terkubur, karena yang terjadi justru kebebasan politik dijadikan sarana pertarungan para elit dalam meraih kekuasaan (Muthhar, 2020)

Fakta bahwa berbagai bangsa hidup bersama di Indonesia, bersama dengan adat istiadat budaya mereka, adalah salah satu bentuk subjektivitas dan keunikan tersendiri. Dalam percakapan tentang hidup bersama, keberagaman, yang sering disebut sebagai kondisi multikultural, adalah komponen penting.

Indonesia yang merupakan bangsa timur, memiliki budaya gotong royong yang menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan sudah menjadi darah-daging bangsa Indonesia. Sejak masa kecil, kita telah dikenalkan dengan konsep "jati diri bangsa", yang mencerminkan perilaku dan sikap sebagai bagian dari identitas personalitas yang membedakan Indonesia dari negara lain. Konsep jati diri ini telah tertanam sejak masa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan tercermin dalam pendidikan

kewarganegaraan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pokok identitas tersebut (Mubarokah, 2024).

Berbagai aspek kehidupan seperti, subjektivitas, polaritas, multikultural, keunikan dari setiap sisi kehidupan bangsa menjadi satu dalam sebuah ruang publik. Pada ruang publik inilah, individu dari berbagai macam kelompok masyarakat berkumpul dalam rangka membicarakan dan memperjuangkan segala hal yang menyangkut kepentingan mereka bersama. Oleh karena itu, kehidupan bersama masyarakat dalam sebuah payung demokrasi sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam sebuah ruang publik.

Melihat sejarah kepemimpinan kita, sangat jarang ditemukan seorang pemimpin di negara ini memanfaatkan ruang publik (demokrasi) sebagai ruang bersama untuk berdialog bersama-sama menyampaikan dan mendengarkan aspirasi masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Hampir sebagian pemimpin di negara ini lebih mengedepankan aspirasi otoritas mereka untuk menentukan sebuah kebijakan tanpa mengindahkan suara rakyat (publik). Artinya apa yang diputuskan oleh pemerintah menjadi sebuah keputusan absolut yang harus diterima oleh rakyat (Basyir,2018).

Sebuah bangsa multikultur seperti Indonesia memiliki potensi konflik yang besar. Konflik tersebut didasari oleh perbedaan-perbedaan cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur. Dalam perbedaan cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur tersebut, sangat mungkin terjadi prasangka etnis yang dapat memicu pada terjadinya konflik komunal (Yusar, 2015).

Ruang publik menjadi salah satu cara untuk melakukan prinsip demokrasi yaitu berkumpul, berserikat dan menyuarakan pendapat. Sehingga, permasalahan komunal dapat dihadapi secara bersama dengan mencari solusi dari berbagai kearifan lokal yang ada melalui sebuah ruang publik. Berjalannya ruang publik serta partisipasi publik dalam setiap keputusan atau perumusan kebijakan negara, merupakan salah satu contoh cita-cita demokrasi terlebih pasca reformasi. Diperlukan sebuah tempat bagi warga negara agar bisa dengan leluasa mempraktekkan cita-cita demokrasi, yaitu ruang publik itu sendiri.

Pada titik semacam ini, kekhawatiran Jurgen Habermas menemukan koordinatnya. Habermas memprihatinkan ruang publik yang hilang, di mana masyarakat bisa bertukar informasi, menginteraksikan ide dan opininya dengan santai dan tanpa tendensi politis tertentu. Kalau Habermas melihat salon-salon di Perancis dan *café-café* di Inggris sebagai ruang publik yang hilang, Indonesia punya banyak warung kopi, punya banyak tahlilan dan *kenduren*, yang bisa menjadi tawaran ruang publik yang terbuka dan egaliter (Hasanudin, 2018).

Ruang diskusi merupakan salah satu implementasi dari pendapat Jurgenn Habermas tentang ruang publik. Menurut Habermas (dalam Badilo, 2017) mengatakan bahwa, ruang publik adalah ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul membentuk suatu publik, untuk memperbincangkan masalah publik. Ruang publik sendiri bersifat terbuka bagi siapa saja dan tidak berkonsentrasi terhadap kekuasaan dalam bentuk perintah yang memecah belah namun memangkas prinsip yang jadi landasan aturan tersebut. Ruang publik harus berisikan masyarakat privat itu sendiri tujuannya agar bebas dari kendali

pemerintahan sehingga opini publik dapat terbentuk untuk mencapai konsensus sosial yang bebas dari sensor dan dominasi.

Pada awalnya ruang publik muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial (Habermas, 1989).

Namun, menurut Yudhistira (2012), tidak pernah ada era ‘ruang publik borjuis’ yang dapat dijadikan kriteria untuk mengukur demokrasi di dalam masyarakat kita, karena ruang publik dalam pengertian normatif, seperti yang dikemukakan Habermas, tidak pernah ada. Jika menelaah dari pernyataan Yudhistira tentang tidak adanya ruang publik yang murni memberikan tempat atau ruang bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengutarakan pendapat, tentunya melihat bagaimana otoritarianisme yang Indonesia alami selama masa Orde Baru. Hadirnya reformasi memberi angin segar bagi demokrasi, bukan hanya persoalan politik namun juga budaya serta persoalan ekonomi. BangBang Wetan memiliki peluang untuk menjadi sebuah wadah mewujudkan cita-cita demokrasi melalui ruang publik.

Ruang diskusi merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita Habermas tentang ruang publik, yaitu sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk membicarakan atau berdiskusi terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar

mereka. Dalam pandangan Habermas, ruang publik dan ruang diskusi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat sipil yang sehat. Ruang publik memungkinkan semua individu berpartisipasi dalam percakapan sosial yang inklusif, sedangkan ruang diskusi memberikan struktur untuk membahas isu-isu penting secara mendalam. Keduanya mendukung proses demokrasi dan emansipasi individu dari penindasan sosial dan politik.

Majelis Maiyah merupakan suatu komunitas yang dapat menghimpun berbagai lapisan masyarakat dan memberikan kontribusi dengan menghadirkan wajah baru pada dunia komunitas di Indonesia. Pada umumnya majelis merupakan suatu kumpulan individu yang terdiri dari latar belakang dan pandangan yang sama. Hal tersebut berbeda di dalam Majelis Maiyah, di mana Majelis Maiyah dalam kenyataannya terdiri dari kumpulan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan beragam (Sohibul, 2022).

Salah satu Majelis Maiyah yang bertempat di Surabaya adalah BangBang Wetan, merupakan sebuah forum diskusi yang pertama kali didirikan pada tahun 2006, mempunyai tujuan yaitu *sinau bareng* serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti *liberte, egaliter, fraternite* yang berarti kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Forum ini selalu dilaksanakan sehari setelah bulan purnama pada penanggalan Jawa atau Hijriah yang mengikuti pola revolusi bulan. BangBangWetan merupakan sebuah produk dari sebuah pandangan yang bernama Maiyah, Maiyah sendiri diprakarsai oleh Emha Ainun Nadjib atau yang biasa dikenal dengan Cak Nun, dengan forum diskusi pertama yaitu padhang mbulan yang bertempat di Sumobito, Jombang pada tahun 1994. Lalu menyebar di berbagai

kota dan daerah di Indonesia, Seperti Kenduri Cinta di Jakarta, Gambang Syafaat di Semarang, Mocopat Syafaat di Yogyakarta, dan BangBang Wetan di Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sohibul (2022) menyebutkan bahwa, komunitas ini selalu menekankan pentingnya dialog antara anggota komunitasnya. Jika dilihat komunitas ini mirip dengan pengajian karena diembel-embeli identitas keagamaan Islam, seperti shalawat, dzikir, dan doa bersama. Akan tetapi, topik permasalahan yang diangkat dalam pertemuan bulannya, tidak terbatas masalah keagamaan saja, tapi berskala nasional, bahkan internasional.

Eksistensi BangBang Wetan sebagai sebuah Simpul Maiyah di Surabaya sudah sangat teruji. Sebagai Simpul Maiyah, Bangbang Wetan ibarat mesin yang selalu *standby* untuk men-*support* Padhangmbulan, Ibu Maiyah di Menturo. Begitu juga jika Mbah Nun dan KiaiKanjeng sedang menjalani rangkaian acara di Jawa Timur, teman-teman penggiat Bangbang Wetan sangat sigap mendukung kelancaran acara. (Fahmi, 2022).

BangBang Wetan adalah sebuah komunitas yang memiliki konsep forum diskusi yang berbeda, dengan mengedepankan asas *sinau bareng*, siapapun dapat memberikan opini terhadap sebuah tema terlepas dari narasumber yang dihadirkan dalam forum tersebut. Suasana *gayeng* mendorong siapapun dari berbagai latar belakang untuk mengikuti forum diskusi tanpa terbentur oleh tembok batasan yang diberikan oleh forum diskusi konvensional seperti di universitas, seminar, maupun di ruang kelas. Dengan meniadakan hirarki narasumber dan audiens, dapat mendorong audiens untuk terbuka dan tidak monoton.

Kegiatan kajian rutin atau kegiatan maiyahan tersebut mempunyai tujuan untuk *sinau bareng* (belajar bersama), menjalin silaturahmi, kerukunan, dan persaudaraan bagi jamaah atau orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun terdapat keberagaman dari para penggiat dan jamaah Majelis Maiyah BangbangWetan, namun dalam pelaksanaannya keberagaman tersebut tidak menimbulkan gesekan yang mengarah pada konflik, karena jamaah Maiyah sudah saling belajar mengenai nilai kebersamaan dalam keberagaman (Sohibul, 2022).

Cak Nun atau Mbah Nun adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam gerakan Maiyah di Indonesia. Mbah Nun dikenal sebagai seorang budayawan, sastrawan, dan tokoh yang aktif dalam aktivitas di berbagai daerah Indonesia. Kontribusinya dalam mengembangkan gerakan Maiyah tidak dapat dipungkiri. Mbah Nun berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai spiritual dan budaya Jawa melalui kegiatan *sinau bareng* dan diskusi yang diadakan dalam simpul Maiyah. Beliau memiliki gaya penyampaian yang khas dan dalam menjelaskan konsep-konsep logis, ilahi, moral, budaya dan kehidupan. Jamaah Maiyah memang tidak bisa melepaskan diri dari Mbah Nun sebagai figur panutan, tetapi pengkultusan bukan menjadi ideologi massal di Jamaah Maiyah. Meskipun Mbah Nun tidak bisa hadir di dalam setiap simpul Maiyah di daerah yang tidak dapat beliau kunjungi, tetap saja forum bisa berlangsung dengan baik.

Konsep ruang publik dalam lingkup antar budaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia. Ruang publik menghadirkan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan juga sebagai tempat untuk mengaktualisasi diri. *Sinaw bareng* yang dilakukan oleh

kelompok Maiyah di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi dari ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas. Mbah Nun menekankan bahwa format BangBangWetan nantinya harus egaliter, siapapun dari kalangan manapun bebas dan merasa nyaman untuk menghadirinya, tidak sebatas pada yang beragama islam saja, melainkan semua pemeluk agama apapun boleh hadir, bahkan penganut atheispun dipersilahkan, karena forum ini adalah forum Maiyah, forum kebersamaan bagi semua makhluk Allah (Blora,2015).

Format *sinau bareng* yang *egaliter* sudah sangat membuktikan bahwa maiyahan dapat diterima oleh siapapun saja. Dalam *sinau bareng*, semua orang yang datang memiliki hak yang sama. Tidak ada aturan bahwa jamaah adalah pihak yang hanya mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber yang berbicara di panggung. Keterbukaan dalam *sinau bareng* seperti ini mengajarkan tanggung jawab bahwa apa yang akan disampaikan adalah muatan ilmu atau informasi yang memiliki landasan sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, bukan hanya asal bicara. *Sinau bareng* yang dilaksanakan di beberapa tempat, lokasinya adalah ruang publik yang sangat terbuka, yang begitu mudah masyarakat umum mengakses lokasi tersebut (Fahmi, 2018).

Dalam merawat demokrasi selama 18 tahun, BangBang Wetan tetap konsisten menjalankan prinsip-prinsip ruang publik sebagaimana menjadi sebuah ruang publik, terkecuali pada waktu pandemi kemarin yang memaksa seluruh umat manusia mengubah kebiasaan hidup mereka demi menyelamatkan nasib orang banyak.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti BangBang Wetan dikarenakan BangBang Wetan merupakan sebuah komunitas atau forum diskusi yang melakukan prinsip ruang publik serta konsep diskusi yang berbeda dari forum atau komunitas lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana BangBang Wetan sebagai ruang publik (*public sphere*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengungkap dan menganalisis BangBang Wetan sebagai ruang publik(*public sphere*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran BangBang Wetan sebagai ruang publik, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang komunikasi, ruang diskusi atau ruang publik dan Maiyah.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai ruang publik dan komunitas BangBang Wetan dalam melanjutkan penelitian ini.

Bagi komunitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru mengenai ruang publik sehingga dapat memberi pendekatan baru dalam menjalankan proses ruang publik dalam komunitas.